

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Dari penjelasan pada bab-bab diatas penulis menyimpulkan bahwa kawasan ASEAN sangat rentan terhadap kejahatan transnasional, salah satunya perkembangan industri narkoba. Terjadinya peningkatan aktifitas-aktifitas kejahatan transnasional di ASEAN tidak lepas dari karakter negara-negara anggota ASEAN yang mayoritas masih memiliki lembaga hukum yang lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku dan pemproduksi narkoba untuk memaksimalkan aktifitas mereka. Faktor pendukung lainnya adalah letak kawasan ASEAN yang sangat strategis untuk dijadikan wilayah produksi, distribusi, serta wilayah transit narkoba. Tidak hanya itu, tingginya peredaran narkoba di ASEAN juga dilator belakang oleh beberapa hal lain seperti lemahnya manajemen perbatasan, kurangnya komitmen dari negara-negara anggota ASEAN, dan permasalahan dana. ASOD merupakan hasil dari sekuritasasi serta demand dari negara-negara anggota agar dibentuknya sebuah rezim internasional yang berperan secara total terkait meningkatnya aktifitas industri narkoba dikawasan ASEAN. Maka dari itu, ASOD adalah elemen utama dari kerangka ASEAN yang bertugas merumuskan, merancang, dan mengkonsolidasikan upaya kolaboratif dalam mengawasi dan mencegah permasalahan narkoba. Secara garis besar ASOD berperan dan memiliki wewenang untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral.

Sejauh ini melalui ASOD, ASEAN telah menjalankan kerjasama dengan negara-negara di dalam maupun luar kawasan ASEAN dalam kerangka bilateral, sedangkan dalam kerangka kerjasama inter regional, ASEAN telah membangun kerjasama dengan UNDCP, UNDP, dan Uni Eropa. Kerjasama yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperoleh beberapa keuntungan seperti adanya pertukaran informasi dan expertise (keahlian) dalam hal manajemen pengelolaan

permasalahan yang strategis. Selain itu melalui kerjasama eksternal tersebut ASEAN mampu menutupi dana yang selama ini menjadi faktor penghambat program ASOD. Secara umum, peran ASOD berisikan tiga variabel utama yaitu; kebijakan, pendekatan, dan strategi. Kebijakan merupakan komponen yang mendorong negara-negara ASEAN untuk dapat menyelaraskan pandangan, pendekatan, strategi, dan koordinasi yang lebih efektif pada tingkat nasional, regional, dan internasional, serta memberdayakan LSM, NGO, dan organisasi terkait. Pendekatan menjadi komponen yang mendorong negara-negara ASEAN untuk segera menerapkan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang didalam mengatasi masalah narkotika yang selanjutnya harus tercermin pada implementasi program-program dan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan strategi merupakan komponen ketiga yang bertujuan merekomendasikan berbagai langkah strategis untuk mengurangi persediaan atau peredaran dan permintaan serta mempertegas sistem pengawasan legalnya.

Sebuah rezim dibentuk untuk mencapai keefektifan sebuah kerjasama melalui pengambilan keputusan yang diwadahi oleh rezim tersebut. Sejauh ini peran ASOD hanya sebatas membangun kerjasama eksternal, memfasilitasi, mewadahi serta memberikan rekomendasi terkait penanggulangan industri narkotika. Namun untuk implementasi kebijakan, program, dan strategi dikembalikan lagi kepada negara-negara anggota. Dengan kata lain, ASOD tidak berperan untuk terjun langsung kelapangan dalam bentuk aksi. Akan tetapi dengan adanya ASOD tentunya juga memberikan manfaat bagi negara-negara ASEAN karena dapat menyelaraskan pandangan, strategi, dan kebijakan sehingga dapat menunjang kerjasama yang efektif. Selain itu melalui pertukaran informasi serta keahlian yang diwadahi oleh ASOD, negara-negara ASEAN akan mampu menyelesaikan permasalahan dalam skala nasional.

Dari tulisan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa semua upaya yang dilakukan ASOD, dengan melihat upaya ASOD dalam menanggulangi drugs trafficking di Indonesia 2016-2018 kurang memberikan dampak yang maksimal,

berdasarkan teori *Comperhensive Security* yang dikemukakan oleh Buzan dikatakan bahwa keamanan dapat tercapai dengan adanya kerjasama yang solid dengan tidak hanya satu pihak namun dengan banyak pihak, walaupun ASOD telah bekerjasama dengan banyak pihak dan menghasilkan banyak rancangan program kerja namun ASOD tidak melakukan upaya nyata dan tidak terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini ke Indonesia secara langsung, ASOD hanya melakukan pertemuan serta mengupayakan, dan meyelaraskan pandangan negara-negara anggota, yang kemudian untuk diimplementasikan kenegarannya masing-masing. Se jauh penilaian penulis implementasi upaya bersama ASOD di Indonesia belum terlihat maksimal terhadap penurunan angka *Drugs Trafficking* di Indonesia hingga tahun 2018, dengan masih meningkatnya produksi narkoba dan permintaan narkoba dengan harga yang tinggi.

Kemudian dilihat juga dari variabel struktural dan variabel kontekstual, yang juga menjelaskan peran organisasi, ASOD dilihat dari beberapa ukuran variabel struktural seperti struktur keorganisasian, kompetensi formal, ketersediaan sumber daya, dan keterlibatan pemangku kepentingan cenderung tidak efektif. Struktur organisasi yang hanya melakukan pertemuan tidak mengikat negara anggotanya, tugas dan perannya pun tidak mewajibkan serta kurangnya komitmen negara-negara anggota, dan minimnya dana. Dilihat juga dari variabel kontekstual yang dilihat dari isi joint declaration 1998, yang berisi imbauan kepada ASOD untuk meningkatkan kerjasama. Serta mengatasi masalah Narkoba hanya berisikan himbauan, upaya, dan saran. Jadi tidak terlihat mengikat.

## V.2 Saran

Fenomena kejahatan transnasional yang semakin meningkat merupakan ancaman non konvensional, pada saat ini telah menjadi bagian utama negara-negara ASEAN. Hal ini adalah wajar karena jenis kejahatan ini tidak mengenal batas kedaulatan. Untuk selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa Kerjasama ASEAN dalam menangani masalah

drugs trafficking dapat dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan bersama bangsa-bangsa di Asia Tenggara.

Dalam setiap tahunnya negara-negara di ASEAN melaporkan perkembangan program mengenai pemberantasan narkoba, mulai dari yang terlaksana, tertunda hingga tidak terlaksana. Namun sayangnya dalam setiap tahun focus yang di buat oleh ASOD berbeda-beda, seringkali program-program yang tertunda di tahun sebelumnya tidak di bahas secara tuntas untuk di lanjutkan di tahun mendatang yang menyebabkan program tersebut justru tidak terlaksana. Di luar dari itu, rapat ASOD justru memunculkan gagasan-gagasan brilian yang baru yang kemudian menjadi daftar *waiting list* untuk kemudian menunggu hasil akan terlaksana ataupun tidak.

ASEAN sebagai organisasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara tentunya masih mengalami beberapa hambatan dan tantangan dalam menangani masalah drugs trafficking seperti kurangnya komitmen dari negara-negara anggota ASEAN dalam hal penanggulangan drugs trafficking, selain itu masalah pendanaan juga menghambat proyek ASEAN dalam membersntas drugs trafficking serta faktor-faktor lainnya seperti geografis Asia Tenggara sendiri. Kedepannya penulis berharap negara-negara ASEAN dapat berkomitmen penuh dan merumuskan tujuan lebih mengerucut untuk mewujudkan ASEAN Work Plan on Securing ASEAN Community Against Illicit Drugs 2016-2025.